

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kekuasaan

Teori kekuasaan adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu politik dan sosiologi yang membahas bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan digunakan oleh individu, kelompok, atau institusi dalam masyarakat. Secara umum, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini tidak hanya berkaitan dengan politik formal seperti negara dan pemerintahan, tetapi juga dengan hubungan sosial sehari-hari, di mana kekuasaan dapat muncul dalam bentuk dominasi ekonomi, budaya, atau simbolik.

Teori patronase dan klientelisme adalah konsep yang digunakan dalam ilmu politik untuk menjelaskan hubungan asimetris antara dua aktor, di mana seorang patron menyediakan sumber daya atau perlindungan kepada klien, dan klien memberikan dukungan politik atau sosial kepada patron. Hubungan ini didasarkan pada ketergantungan klien terhadap patron, yang sering terjadi dalam sistem politik kurang institusional. Penelitian tentang patronase dan klientelisme banyak ditemukan di negara-negara berkembang di mana akses sumber daya terpusat pada aktor tertentu.

Patronase merupakan hubungan kekuasaan di mana patron dengan sumber daya lebih, seperti kekayaan atau akses politik, memberikan bantuan kepada klien yang kurang sumber daya. Dalam konteks politik, patron adalah pejabat publik atau calon pejabat yang menawarkan pekerjaan, akses layanan publik, atau uang tunai

kepada pemilih sebagai imbalan dukungan politik. Patronase sering kali muncul dalam sistem politik yang informal, di mana relasi personal lebih dominan ketimbang aturan formal. Ciri utama patronase adalah relasi yang sangat personal dan berdasarkan loyalitas. Hubungan patron-klien tidak hanya bersifat politik tetapi juga sosial, di mana patron memberikan perlindungan atau bantuan ekonomi. Hubungan ini ditandai oleh ketergantungan klien yang harus membalas patron dengan dukungan politik atau sosial . Menurut Scott (1976), patron tidak hanya memberikan bantuan material tetapi juga memastikan keamanan ekonomi dan sosial klien dan menciptakan hubungan timbal balik yang stabil.

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa klientelisme memainkan peran penting dalam politik lokal, terutama di Pilkades. Studi oleh Aspinall dan Mietzner (2010) menemukan bahwa patron-patron lokal sering kali menggunakan sumber daya ekonomi dan politik untuk membeli dukungan pemilih di tingkat desa. Penggunaan dana desa untuk mengamankan dukungan politik juga umum terjadi, yang memperlihatkan betapa pentingnya hubungan patron-klien dalam proses pemilihan kepala desa. Studi lain menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hubungan patron-klien diperkuat oleh hubungan kekeluargaan dan jaringan sosial yang erat. Di komunitas pedesaan, calon kepala desa yang memiliki hubungan personal dengan masyarakat cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan politik, yang mencerminkan pentingnya modal sosial dalam klientelisme .

Berdasarkan teori patronase, hubungan antara Dadan Ridwan dan Ijang dapat dikategorikan sebagai bentuk relasi patron-klien yang sangat khas di politik lokal. Ijang, sebagai pengusaha tambang dan patron dalam hubungan ini, menyediakan

sumber daya yang sangat penting untuk kampanye Dadan Ridwan, berupa dukungan finansial dan jaringan sosial. Sebagai gantinya, setelah Dadan terpilih menjadi kepala desa, ia memberikan imbalan dalam bentuk fasilitas publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, namun dialihkan untuk kepentingan pribadi. Dalam teori klientelisme, hubungan ini sangat transaksional, di mana patron (Ijang) menyediakan modal untuk memastikan bahwa klien (Dadan Ridwan) dapat memenangkan pemilihan kepala desa. Setelah terpilih, Dadan terikat pada kewajiban untuk memberikan timbal balik kepada Ijang. Salah satu bentuk timbal balik ini adalah memberikan akses eksklusif kepada fasilitas publik yang sebenarnya seharusnya dinikmati oleh masyarakat desa secara umum, namun dialihkan untuk memperkuat kepentingan bisnis tambang Ijang.

Penelitian oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (2010) menunjukkan bahwa hubungan semacam ini sering terjadi dalam politik lokal di Indonesia. Pengusaha lokal yang memiliki modal besar, seperti Ijang, biasanya memanfaatkan posisi mereka untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang dapat diandalkan untuk memberikan akses eksklusif setelah pemilihan. Dalam hal ini, Dadan Ridwan, sebagai kepala desa terpilih, menggunakan kekuasaannya untuk mengalokasikan sumber daya atau fasilitas yang tidak setara demi menguntungkan kepentingan pribadi Ijang. Kejadian seperti ini menimbulkan dampak negatif pada masyarakat desa karena fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan publik dialihkan untuk memperkuat bisnis pribadi. Hal ini sesuai dengan teori James Scott (1976) tentang "moral ekonomi," di mana pemimpin yang terpilih dengan dukungan patron

sering kali cenderung menomorduakan kepentingan umum demi menjaga hubungan mereka dengan klien yang memberikan modal.

2.2 Teori Oligarki

Oligarki (*Oligarch*) adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya tersebut harus tersedia untuk digunakan demi keuntungan pribadi, biarpun tidak harus dimiliki sendiri. Tiga hal saling bersangkutan paut, yang pertama kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang beda dari sumber segala kekuasaan lain yang bisa terkonsentrasi di tangan minoritas. Kedua, oligarki selalu berupa individu. Dan yang ketiga, definisi oligarki tetap konstan dan membedakan mereka dengan elit. (Winters, 2011).

Teori Oligarki Kekuasaan adalah konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah masyarakat atau organisasi cenderung dikonsentrasikan pada sekelompok kecil individu atau elit. Teori ini sering dikaitkan dengan karya Robert Michels, seorang sosiologi Jerman yang mengemukakan "Hukum Besi Oligarki" dalam bukunya "*Political Parties*" (1911). Michels berargumen bahwa organisasi apa pun, termasuk partai politik yang demokratis sekalipun, akan secara alami berkembang menjadi oligarki. Michels berpendapat bahwa struktur organisasi yang kompleks memerlukan spesialisasi dan manajemen yang efisien. Hal ini menyebabkan delegasi kekuasaan kepada pejabat atau kelompok kecil, yang akhirnya mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengendalikan organisasi (Michels, 2001).

Semua bentuk organisasi, tidak peduli seberapa demokratisnya pada awalnya, akan cenderung menjadi oligarkis. Artinya, sekelompok kecil orang akan menguasai dan membuat keputusan penting, sementara partisipasi anggota yang lebih luas menjadi terbatas. Peningkatan birokratisasi dalam organisasi memperkuat kecenderungan oligarki karena membuat struktur kekuasaan menjadi lebih kaku dan sulit untuk diubah. Pejabat yang berkuasa mendapatkan keuntungan dari struktur ini untuk mempertahankan dan memperkuat posisi mereka. Michels juga berpendapat bahwa upaya untuk menggulingkan oligarki sering kali berakhir dengan terbentuknya oligarki baru. Ini karena struktur organisasi dan kebutuhan akan kepemimpinan yang efektif secara alami mengarah pada pembentukan elit baru (Michels, 2001).

Menerapkan konsep oligarki kekuasaan dalam konteks pemilihan kepala desa menawarkan perspektif menarik terhadap dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan desa. Meskipun pemilihan kepala desa dirancang sebagai proses demokratis yang memberi kesempatan kepada seluruh warga desa untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, prakteknya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencerminkan prinsip oligarki. Dalam banyak kasus, kekuasaan dalam desa cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau keluarga yang memiliki pengaruh signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Kelompok elit ini dapat memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendukung calon tertentu, atau bahkan menjadi calon kepala desa itu sendiri, sehingga membatasi pilihan yang tersedia bagi warga desa lainnya.

Michels menyatakan bahwa "siapa pun yang berorganisasi, mengoligarkikan," merujuk pada ironi demokrasi di mana sistem yang didesain untuk melibatkan

partisipasi massal secara tidak terhindarkan mengarah pada dominasi oleh segelintir individu. Dalam konteks pemilihan kepala desa, konsep ini bisa menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi dan politik dapat terkonsentrasi di tangan beberapa orang, seringkali menyingkirkan suara mayoritas.

Dalam skenario pemilihan kepala desa, aktor oligarki seringkali merupakan individu atau kelompok yang memiliki akses ekonomi dan sumber daya yang signifikan. Misalnya, pemilik usaha besar di desa, elit politik lokal, atau bahkan aktor eksternal seperti pengusaha yang berinvestasi di desa tersebut. Mereka menggunakan pengaruh dan sumber daya mereka untuk mengontrol atau mempengaruhi hasil pemilihan, seringkali melalui pendanaan kampanye atau dengan cara memberikan bantuan langsung kepada penduduk. Strategi ini tidak hanya mengamankan posisi mereka dalam struktur kekuasaan desa tapi juga memperkuat dependensi ekonomi masyarakat terhadap mereka.

Aktor oligarki juga memanfaatkan jaringan sosial dan politik untuk mempertahankan kontrol mereka. Ini bisa mencakup pembentukan aliansi dengan kelompok-kelompok strategis di dalam desa, seperti pemimpin adat atau tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dengan memelihara hubungan ini, oligarki memastikan bahwa mereka memiliki dukungan sosial yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan atau untuk mempengaruhi kebijakan setelah pemilihan. Selain itu, mereka seringkali menggunakan media atau propaganda untuk membentuk persepsi publik dan mempengaruhi opini pemilih, memperkuat gambaran mereka sebagai pemimpin yang tidak tergantikan.

Oligarki dalam pemilihan kepala desa sering terlibat dalam taktik yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Ini termasuk manipulasi peraturan pemilihan, penggunaan intimidasi atau tekanan terhadap lawan politik, dan kadang-kadang, manipulasi penghitungan suara. Tindakan-tindakan ini merusak integritas proses pemilihan, dan mengkonsolidasikan kekuatan di tangan elit yang sudah berkuasa, serta mengurangi kemungkinan terjadinya perubahan kepemimpinan yang bisa membawa perubahan positif bagi seluruh komunitas.

Akhirnya, menghadapi fenomena oligarki dalam pemilihan kepala desa membutuhkan strategi yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan lembaga-lembaga independen yang bisa memantau pemilihan, dan pengembangan regulasi yang lebih ketat untuk mendukung keadilan dan transparansi. Pendidikan politik dan sosial untuk warga desa adalah kunci untuk mengurangi pengaruh oligarki, bersama dengan peran aktif media dan lembaga pengawas dalam melaporkan dan mengekspos praktik tidak adil. Dengan mengurangi ketergantungan ekonomi pada oligarki dan memperkuat mekanisme demokrasi, desa-desa dapat bergerak menuju tata kelola yang lebih adil dan representatif.

Elit yang berkuasa seringkali memiliki akses lebih baik ke informasi dan sumber daya, termasuk dana kampanye, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses pemilihan, di mana calon dari latar belakang yang lebih sederhana mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Oligarki dapat memfasilitasi praktik nepotisme dan patronase, di mana posisi dan keputusan politik dibagi berdasarkan hubungan pribadi atau loyalitas daripada kualifikasi atau keinginan masyarakat. Hal ini dapat

mengakibatkan pemilihan kepala desa yang lebih didasarkan pada jaringan kekuasaan daripada kompetensi. Dalam beberapa situasi, kekuatan eksternal, seperti partai politik, pengusaha, atau bahkan lembaga pemerintah tingkat lebih tinggi, bisa mencoba mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri. Ini dapat mengurangi otonomi desa dan menempatkan kepala desa terpilih di bawah pengaruh kelompok-kelompok tersebut. Mengubah struktur kekuasaan di desa sering kali menghadapi hambatan besar. Struktur sosial dan politik yang ada mendukung status quo, membuat perubahan signifikan sulit terjadi. Untuk mengatasi potensi oligarki kekuasaan dalam pemilihan kepala desa, diperlukan mekanisme kontrol dan keseimbangan yang kuat, termasuk transparansi dalam proses pemilihan, pendidikan politik bagi warga desa, serta pengawasan yang efektif dari lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa tetap adil, kompetitif, dan mewakili keinginan sebenarnya dari masyarakat desa.

2.3 Teori Ekonomi Politik

Ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi bidang ilmu tersendiri namun kajian ilmu ekonomi politik tetap masih ada dan diterapkan pada perusahaan. Perusahaan sebagai organisasi bisnis yang memiliki faktor-faktor pendukung dari luar yang disebut lingkungan. Lingkungan luar dibedakan menjadi lingkungan tugas dan lingkungan umum. Lingkungan tugas yaitu lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara langsung seperti pemilik, pemasok, pelanggan dan serikat pekerja. Sedangkan lingkungan umum yaitu lingkungan yang pengaruhnya bersifat tidak

langsung terhadap organisasi. Salah satu lingkungan tak langsung yang mempengaruhi organisasi bisnis adalah lingkungan politik (Hesantera, 2022).

Politik memiliki pengaruh besar bagi investor asing memberanikan perusahaannya untuk menanamkan modal di Indonesia, karena dengan adanya kondisi politik yang stabil, menandakan adanya keamanan negara yang kondusif. Investor asing akan memiliki anggapan bahwa resiko kegagalan membangun bisnis juga akan lebih rendah sebanding dengan kondisi kesetabilan politik, oleh karena itu terdapat hubungan keterkaitan antara pelaku politik dan pelaku bisnis atau sebaliknya. Membahas tentang keterkaitan antara hubungan ekonomi dan politik, hal ini pun menjadi salah satu sorotan dalam kasus maraknya politik uang. Teori politik uang mengacu pada pandangan bahwa uang atau kekayaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, terutama dalam proses pemilihan umum dan dalam membentuk kebijakan pemerintah.

Robert Dahl, seorang ahli teori demokrasi menyatakan bahwa pengaruh uang dalam politik dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Dahl menyoroti bahwa dalam sistem politik yang demokratis, semua warga seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi dominasi keuangan dapat merusak prinsip-prinsip ini. Pendapat ini mencerminkan keprihatinan mereka terhadap potensi distorsi dan ketidaksetaraan dalam proses politik yang disebabkan oleh kekuatan ekonomi. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan mereka, tema umumnya adalah kekhawatiran terhadap bagaimana uang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan mendorong ketidaksetaraan dalam proses politik (Rasheed, 2021).

Pada tingkat kekuasaan, terlihat jelas bahwa aktor-aktor politik beroperasi di tingkat lokal dengan berpartisipasi dalam politik lokal, yaitu pemilihan kepala daerah. Demikian pula pengaruh dan kekuasaan politik yang diperolehnya juga bersifat lokal atau regional. Ruang sisi merupakan ruangan tertutup. Aktor politik dan kepala daerah terpilih, yaitu terdapat ruang tertutup yang tidak dapat diakses oleh orang lain, kecuali untuk pembahasan konsesi dan kesepakatan pengambilan kebijakan terkait kebijakan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah didukung oleh politisi. Ruang tertutup juga terjadi dalam proses pemilukada, terutama pada saat pembelian suara dari calon pemilih (*vote purchase*) dan pelaksanaan kebijakan moneter. Tim yang melakukan eksekusi di tingkat desa tidak diketahui masyarakat umum. Tim secara diam-diam bergerak menyerang titik-titik yang didekati dan mempunyai kesepakatan untuk mendukung kemenangan melalui kebijakan moneter (Hidayaturrahman, 2022).

Konsep-konsep dasar dalam ekonomi politik membantu pemahaman tentang operasi sistem ekonomi dan dampak kebijakan publik pada ekonomi dan masyarakat. Dalam mempelajari hubungan antara ekonomi dan politik, ada beberapa pendekatan yang berbeda:

- 1) Pendekatan Institusional: Pendekatan ini mengeksplorasi institusi-institusi ekonomi dan politik seperti lembaga keuangan, regulasi, dan hukum, serta cara institusi-institusi ini mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik.
- 2) Pendekatan Marxian: Pendekatan ini didasarkan pada teori Marxisme dan menekankan analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara pemilik modal dan pekerja.

- 3) Pendekatan Kesejahteraan: Pendekatan ini menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari metode untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi.
- 4) Pendekatan Pilihan Rasional: Pendekatan ini menekankan pada cara individu membuat keputusan ekonomi yang rasional dengan tujuan mencapai keuntungan pribadi.
- 5) Pendekatan Sosiologis: Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik.
- 6) Pendekatan Feminis: Pendekatan ini mempertimbangkan peran gender dan bagaimana keputusan ekonomi dan politik berdampak pada gender.
- 7) Pendekatan Lingkungan: Pendekatan ini mempertimbangkan dampak keputusan ekonomi dan politik pada lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik membantu dalam memahami beragam faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik serta hubungan erat antara aspek ekonomi dan politik tersebut (Rachbini,2004). Institusionalisme menyoroti peran institusi, seperti lembaga pemerintahan, hukum, dan regulasi dalam membentuk perilaku individu dan keputusan politik. Dalam konteks pilkades, aturan pemilihan, regulasi yang mengatur kampanye, dan struktur pemerintahan desa sangat mempengaruhi proses dan hasil pemilihan. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana institusi mempengaruhi dinamika pemilihan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana institusi politik dan ekonomi saling berinteraksi. Dalam pilkades,

keputusan ekonomi, seperti alokasi anggaran desa, dapat memengaruhi dukungan politik, dan sebaliknya, keputusan politik dapat memengaruhi pembangunan ekonomi desa. Pendekatan institusionalisme memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap interaksi ini.

Institusi tidak hanya terdiri dari aturan formal, tetapi juga norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Desa Cipakat, pemahaman tentang norma sosial dan budaya yang mengatur perilaku pemilih dan kandidat akan membantu menjelaskan hasil pilkades. Pendekatan institusionalisme memungkinkan analisis ini. Institusi mempengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan. Dalam konteks pilkades, analisis institusional dapat membantu mengidentifikasi bagaimana kebijakan yang ada memengaruhi pemilih, kandidat, dan proses pemilihan, serta implikasinya bagi pembangunan desa.

Pendekatan institusionalisme dalam Pilkades bisa menelaah bagaimana lembaga-lembaga desa, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau lembaga adat, mempengaruhi pemilihan dan kebijakan yang dihasilkan. Lembaga-lembaga ini dapat berfungsi sebagai penengah antara kepentingan berbagai kelompok dan individu, serta mempengaruhi proses dan hasil Pilkades.

Institusionalisme dalam konteks Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menekankan peran dan pengaruh lembaga-lembaga dalam membentuk perilaku aktor politik dan ekonomi serta hasil pemilihan. Lembaga di sini bisa mencakup struktur formal seperti pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, dan aturan-aturan yang mengatur Pilkades, serta lembaga informal seperti norma, tradisi, dan nilai-nilai komunitas. Institusionalisme melihat bahwa

lembaga-lembaga ini bukan hanya sebagai latar belakang untuk aksi politik, tetapi sebagai aktor kunci yang membentuk dan dibentuk oleh dinamika sosial-politik.

Lembaga formal seperti peraturan Pilkades menetapkan "aturan main" yang mengatur proses pemilihan, termasuk siapa yang bisa mencalonkan diri, siapa yang berhak memilih, bagaimana suara dihitung, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Aturan-aturan ini mempengaruhi strategi yang digunakan oleh kandidat dan pendukung mereka serta keadilan dan legitimasi proses pemilihan. Lembaga seperti BPD atau panitia pemilihan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi tentang pemilihan kepada masyarakat, termasuk jadwal pemilihan, profil kandidat, dan prosedur pemungutan suara. Keterbukaan dan transparansi ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan adil dan pemilih dapat membuat keputusan yang informasi.

Setelah pemilihan, lembaga-lembaga desa memiliki peran dalam mengimplementasikan kebijakan yang diusung oleh kepala desa yang terpilih serta dalam mengawasi pemerintahannya. Ini mencakup pengawasan penggunaan anggaran desa, implementasi program pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam perspektif institusionalisme, lembaga-lembaga ini tidak hanya mempengaruhi proses pemilihan itu sendiri tetapi juga legitimasi dan efektivitas kepemimpinan yang muncul dari pemilihan tersebut. Keberadaan dan fungsi lembaga-lembaga yang kuat dan responsif dianggap krusial untuk memastikan bahwa Pilkades menghasilkan kepemimpinan yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penjabaran kerangka pemikiran relasi ekonomi politik dan konflik antar kelas dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melibatkan analisis terhadap bagaimana dinamika kekuatan ekonomi dan politik saling berinteraksi dan mempengaruhi proses serta hasil pemilihan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor ekonomi dan politik mempengaruhi perilaku pemilih, pilihan kandidat, dan kebijakan pemerintahan desa yang dihasilkan.

Relasi ekonomi politik dalam pemilihan kepala desa dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas kepala desa. Jika kepala desa terlalu tergantung pada dana dari pihak tertentu, ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan independen dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini juga akan berimbas pada partisipasi masyarakat dalam proses politik. Jika masyarakat percaya bahwa hasil pemilihan terlalu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada proses demokratis dan mengurangi partisipasi mereka.

Kondisi awal desa ditandai oleh distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya ekonomi yang tidak merata antar penduduk, menciptakan kelas-kelas sosial yang berbeda (misalnya, pemilik tanah besar, petani kecil, buruh tani, dan pengusaha lokal). Kepentingan Ekonomi: Setiap kelompok memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda, yang mempengaruhi pandangan politik mereka dan pilihan kandidat dalam Pilkades. Individu dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi mencalonkan diri atau didorong oleh kelompok tertentu untuk mewakili kepentingan mereka. Kandidat dan pendukungnya menggunakan sumber daya ekonomi dan politik untuk mempengaruhi

pemilih. Ini bisa melalui janji kebijakan, distribusi bantuan, atau propaganda. Masyarakat desa memberikan suara berdasarkan pertimbangan yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, identitas kelas, dan faktor lainnya.

Pemilihan menghasilkan pemenang yang kebijakannya diharapkan mencerminkan kepentingan kelas atau kelompok yang mendukungnya. Hasil pemilihan bisa memperkuat konflik antar kelas jika kelompok yang kalah merasa kepentingannya terabaikan. Ini mungkin memerlukan proses rekonsiliasi dan negosiasi untuk menjaga stabilitas sosial. Ini menunjukkan bahwa relasi ekonomi politik dan konflik antar kelas dalam Pilkadaes adalah proses yang dinamis dan berulang, di mana kebijakan dan keputusan politik mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial desa, yang kemudian membentuk latar belakang untuk kompetisi.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

